



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 64/DPR RI/II/2024-2025**

**TENTANG**

**PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2025  
DAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2025-2029**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 *juncto* Pasal 66 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 *juncto* Pasal 40 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, perlu menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025--2029;
- b. bahwa Keputusan Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada tanggal 18 November 2024 telah menyepakati Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 untuk ditetapkan;
- c. bahwa penetapan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

|  |  |
|--|--|
| Paraf 1<br> | Paraf 2<br> |
|--|--|

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 668);

**Memperhatikan**

- : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-8 tanggal 19 November 2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2025 DAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2025--2029.**

**PERTAMA**

- : Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025--2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

|   |   |
|---|---|
| Paraf 1   | Paraf 2   |
|  |  |

**KEDUA**

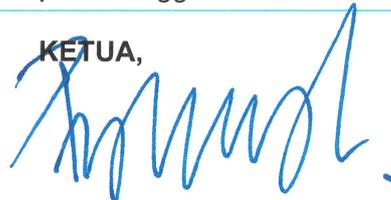
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

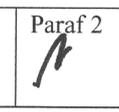
1. Pimpinan DPR RI;
2. Ketua DPD RI;
3. Menteri Hukum RI;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;
5. Ketua Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR RI;
6. Para Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI;
7. Para Ketua Fraksi : FPDJ Perjuangan, FPG, F-PGERINDRA, FNASDEM, FPKB, FPKS, FPAN, dan FPDEMOKRAT.
8. Sekretaris Jenderal DPR RI;
9. Para Deputi, Inspektur Utama, dan Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI;
10. Para Kepala Biro/Pusat Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 19 November 2024

**KETUA,**



**Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI**

|   |   |
|---|---|
| Paraf 1   | Paraf 2   |
|  |  |

LAMPIRAN I KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 64/DPR RI/I/2024-2025  
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2024

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2025**

| NO. | JUDUL<br>RANCANGAN<br>UNDANG-UNDANG  | NA DAN RUU<br>DISIAPKAN OLEH | KETERANGAN                 |
|-----|--|------------------------------|----------------------------|
| 1.  | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran                                      | DPR<br>(KOMISI I)            |                            |
| 2.  | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara                                 | DPR<br>(KOMISI II)           |                            |
| 3.  | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana                                     | DPR<br>(KOMISI III)          |                            |
| 4.  | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan  | DPR<br>(KOMISI IV)           |                            |
| 5.  | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan                                       | DPR<br>(KOMISI IV)           |                            |
| 6.  | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                        | DPR<br>(KOMISI V)            |                            |
| 7.  | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen                                  | DPR<br>(KOMISI VI)           |                            |
| 8.  | RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | DPR<br>(KOMISI VI)           |                            |
| 9.  | RUU tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan                                | DPR<br>(KOMISI VII)          | <i>Operan (Carry Over)</i> |
| 10. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh                  | DPR<br>(KOMISI VIII)         |                            |
| 11. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun  | DPR<br>(KOMISI VIII)         |                            |

|  |  |
|--|--|
| Paraf 1<br> | Paraf 2<br> |
|--|--|

| NO. | JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG   | NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH | KETERANGAN                 |
|-----|---|---------------------------|----------------------------|
|     | 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji  |                           |                            |
| 12. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan                                   | DPR (KOMISI IX)           |                            |
| 13. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional                               | DPR (KOMISI X)            |                            |
| 14. | RUU tentang Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> )  | DPR (KOMISI XI)           |                            |
| 15. | RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan   | DPR (KOMISI XII)          | <i>Operan (Carry Over)</i> |
| 16. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban                      | DPR (KOMISI XIII)         |                            |
| 17. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI                                       | DPR (BADAN LEGISLASI)     |                            |
| 18. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara | DPR (BADAN LEGISLASI)     |                            |
| 19. | RUU tentang Komoditas Strategis   | DPR (BADAN LEGISLASI)     |                            |
| 20. | RUU tentang Pertekstilan  | DPR (BADAN LEGISLASI)     |                            |
| 21. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia                     | DPR (BADAN LEGISLASI)     |                            |
| 22. | RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga  | DPR (BADAN LEGISLASI)     |                            |
| 23. | RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern   | DPR (BADAN LEGISLASI)     |                            |

|  |  |
|--|--|
| Paraf 1<br> | Paraf 2<br> |
|--|--|

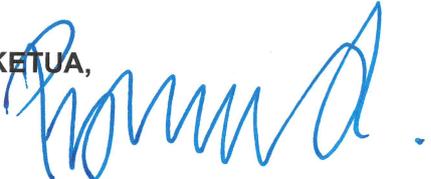
| NO. | JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG  | NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH | KETERANGAN                 |
|-----|--|---------------------------|----------------------------|
| 24. | RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)  | DPR<br>(BADAN LEGISLASI)  |                            |
| 25. | RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang | DPR<br>(BADAN LEGISLASI)  | <i>Operan (Carry Over)</i> |
| 26. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum   | DPR<br>(BADAN LEGISLASI)  |                            |
| 27. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik   | DPR<br>(BADAN LEGISLASI)  |                            |
| 28. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian   | DPR<br>(BADAN LEGISLASI)  |                            |
| 29. | RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim  | DPR<br>(ANGGOTA)/<br>DPD  |                            |
| 30. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta   | DPR<br>(ANGGOTA)          |                            |
| 31. | RUU tentang Masyarakat Hukum Adat  | DPR<br>(ANGGOTA)/<br>DPD  |                            |
| 32. | RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah   | DPR<br>(ANGGOTA)/<br>DPD  |                            |
| 33. | RUU tentang Hukum Acara Perdata  | PEMERINTAH                | <i>Operan (Carry Over)</i> |
| 34. | RUU tentang Narkotika dan Psikotropika   | PEMERINTAH                | <i>Operan (Carry Over)</i> |
| 35. | RUU tentang Desain Industri  | PEMERINTAH                |                            |
| 36. | RUU tentang Hukum Perdata Internasional  | PEMERINTAH                |                            |
| 37. | RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara  | PEMERINTAH                | <i>Operan (Carry Over)</i> |
| 38. | RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik   | PEMERINTAH                |                            |
| 39. | RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber   | PEMERINTAH                |                            |

|  |  |
|--|--|
| Paraf 1<br> | Paraf 2<br> |
|--|--|

| NO. | JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG   | NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH | KETERANGAN |
|-----|---|---------------------------|------------|
| 40. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran | PEMERINTAH                |            |
| 41. | RUU tentang Daerah Kepulauan  | DPD                       |            |

| DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA |   |
|------------------------------|---|
| 1.                           | Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional  |
| 2.                           | Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain:<br>a. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian<br>b. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ( <i>Carry over</i> ) |
| 3.                           | Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara   |
| 4.                           | Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota   |
| 5.                           | Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang   |

KETUA,



Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

|  |  |
|--|--|
| Paraf 1<br> | Paraf 2<br> |
|--|--|

LAMPIRAN II KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA

NOMOR : 64/DPR RI/II/2024-2025

TANGGAL : 19 NOVEMBER 2024

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2025—2029**

| NO  | JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG   | NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH | KETERANGAN/USULAN RUU |
|-----|---|---------------------------|-----------------------|
| 1.  | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran   | DPR                       |                       |
| 2.  | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia   | DPR                       |                       |
| 3.  | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara  | DPR                       |                       |
| 4.  | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik  | DPR                       |                       |
| 5.  | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | DPR                       |                       |
| 6.  | RUU tentang Perkumpulan   | DPR                       |                       |
| 7.  | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  | DPR                       |                       |
| 8.  | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  | DPR                       |                       |
| 9.  | RUU tentang Sistem Tata Produksi dan Niaga Pangan   | DPR                       |                       |
| 10. | RUU tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Hewan  | DPR                       |                       |
| 11. | RUU tentang Pertanian   | DPR                       |                       |

|  |  |
|--|--|
| Paraf 1<br> | Paraf 2<br> |
|--|--|

| NO  | JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG   | NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH | KETERANGAN/USULAN RUU |
|-----|---|---------------------------|-----------------------|
| 12. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan | DPR                       |                       |
| 13. | RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan   | DPR                       |                       |
| 14. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi                        | DPR                       |                       |
| 15. | RUU tentang Pertekstilan  | DPR                       |                       |
| 16. | RUU tentang Sandang   | DPR                       |                       |
| 17. | RUU tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia   | DPR                       |                       |
| 18. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat                            | DPR                       |                       |
| 19. | RUU tentang Bank Makanan  | DPR                       |                       |
| 20. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  | DPR                       |                       |
| 21. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja                             | DPR                       |                       |
| 22. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | DPR                       |                       |
| 23. | RUU tentang Kefarmasian   | DPR                       |                       |
| 24. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan                                   | DPR                       |                       |
| 25. | RUU tentang Pendidikan dan Layanan Kedokteran Hewan   | DPR                       |                       |
| 26. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya                                 | DPR                       |                       |

|  |  |
|--|--|
| Paraf 1<br> | Paraf 2<br> |
|--|--|

| NO  | JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG   | NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH | KETERANGAN/USULAN RUU |
|-----|---|---------------------------|-----------------------|
| 27. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman                       | DPR                       |                       |
| 28. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka                        | DPR                       |                       |
| 29. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik                              | DPR                       |                       |
| 30. | RUU tentang Permuseuman   | DPR                       |                       |
| 31. | RUU tentang Penghapusan Piutang Negara  | DPR                       |                       |
| 32. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara            | DPR                       |                       |
| 33. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan               | DPR                       |                       |
| 34. | RUU tentang Investasi Negara  | DPR                       |                       |
| 35. | RUU tentang Profesi Kurator   | DPR                       |                       |
| 36. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat                                | DPR                       |                       |
| 37. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis | DPR                       |                       |
| 38. | RUU tentang Pidana Tutupan  | DPR                       |                       |
| 39. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban    | DPR                       |                       |
| 40. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan                        | DPR                       |                       |

|  |  |
|--|--|
| Paraf 1<br> | Paraf 2<br> |
|--|--|

| NO  | JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG   | NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH | KETERANGAN/USULAN RUU   |
|-----|---|---------------------------|---|
| 41. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten  | DPR                       |   |
| 42. | RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara  | DPR                       |   |
| 43. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang   | DPR                       |   |
| 44. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan                    | DPR                       | <i>Omnibus</i> (Klaster Pendidikan Kedokteran dan Klaster Pelayanan Kesehatan/Obat) |
| 45. | RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan   | DPR                       |   |
| 46. | RUU tentang Boikot, Divestasi, dan Sanksi   | DPR                       |   |
| 47. | RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol   | DPR                       |   |
| 48. | RUU tentang Keamanan Nasional   | DPR                       |   |
| 49. | RUU tentang Penyadapan  | DPR                       |   |
| 50. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia | DPR                       |   |
| 51. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin      | DPR                       |   |
| 52. | RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  | DPR                       |   |
| 53. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial        | DPR                       |   |
| 54. | RUU tentang Komoditas Strategis   | DPR                       |   |

|  |  |
|--|--|
| Paraf 1<br> | Paraf 2<br> |
|--|--|

| NO  | JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG   | NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH  | KETERANGAN/USULAN RUU |
|-----|---|----------------------------|-----------------------|
| 55. | RUU tentang Komoditas Khas  | DPR                        |                       |
| 56. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak                             | DPR                        |                       |
| 57. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan                          | DPR                        |                       |
| 58. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak                                    | DPR                        |                       |
| 59. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan   | DPR                        |                       |
| 60. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria                                 | DPR                        |                       |
| 61. | RUU tentang Pengelolaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Moda Transportasi   | DPR                        |                       |
| 62. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI                                       | DPR                        |                       |
| 63. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara | DPR                        |                       |
| 64. | RUU tentang Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> )  | DPR                        |                       |
| 65. | RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern   | DPR                        |                       |
| 66. | RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  | DPR                        |                       |
| 67. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun  | DPR/<br>PEMERINTAH/<br>DPD |                       |

|  |  |
|--|--|
| Paraf 1<br> | Paraf 2<br> |
|--|--|

| NO  | JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG   | NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH  | KETERANGAN/ USULAN RUU     |
|-----|---|----------------------------|----------------------------|
|     | 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan   |                            |                            |
| 68. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian                                      | DPR/<br>PEMERINTAH/<br>DPD |                            |
| 69. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran                                  | DPR/<br>PEMERINTAH/<br>DPD |                            |
| 70. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU tentang Narkotika dan Psikotropika) | DPR/<br>PEMERINTAH/<br>DPD | <i>Operan (Carry Over)</i> |
| 71. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan          | DPR/<br>PEMERINTAH/<br>DPD |                            |
| 72. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia                       | DPR/<br>PEMERINTAH         |                            |
| 73. | RUU tentang Hukum Acara Perdata   | DPR/<br>PEMERINTAH         |                            |
| 74. | RUU tentang Hukum Perdata Internasional   | DPR/<br>PEMERINTAH         |                            |
| 75. | RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik  | DPR/<br>PEMERINTAH         |                            |
| 76. | RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara)                             | DPR/<br>PEMERINTAH         |                            |
| 77. | RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati)   | DPR/<br>PEMERINTAH         |                            |
| 78. | RUU tentang Grasi (RUU tentang Grasi, Amnesti, dan Abolisi)   | DPR/<br>PEMERINTAH         |                            |
| 79. | RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)   | DPR/<br>PEMERINTAH         |                            |

|  |  |
|--|--|
| Paraf 1<br> | Paraf 2<br> |
|--|--|

| NO  | JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG  | NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH | KETERANGAN/ USULAN RUU     |
|-----|--|---------------------------|----------------------------|
| 80. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia   | DPR/ PEMERINTAH           |                            |
| 81. | RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber   | DPR/ PEMERINTAH           |                            |
| 82. | RUU tentang Perampasan Aset (RUU tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana)   | DPR/ PEMERINTAH           |                            |
| 83. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (RUU tentang Desain Industri)   | DPR/ PEMERINTAH           |                            |
| 84. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta   | DPR/ PEMERINTAH           |                            |
| 85. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik/ RUU tentang Hukum Acara Sengketa Informasi  | DPR/ PEMERINTAH           |                            |
| 86. | RUU tentang Penyesuaian Pidana/ RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah  | DPR/ PEMERINTAH           |                            |
| 87. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum   | DPR/DPD                   |                            |
| 88. | RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang | DPR/DPD                   | <i>Operan (Carry Over)</i> |
| 89. | RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah   | DPR/DPD                   |                            |
| 90. | RUU tentang Pertanahan   | DPR/DPD                   |                            |

|  |  |
|--|--|
| Paraf 1<br> | Paraf 2<br> |
|--|--|

| NO   | JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG   | NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH | KETERANGAN/USULAN RUU |
|------|---|---------------------------|-----------------------|
| 91.  | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah | DPR/DPD                   |                       |
| 92.  | RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil         | DPR/DPD                   |                       |
| 93.  | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan  | DPR/DPD                   |                       |
| 94.  | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan         | DPR/DPD                   |                       |
| 95.  | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani                      | DPR/DPD                   |                       |
| 96.  | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman                             | DPR/DPD                   |                       |
| 97.  | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura  | DPR/DPD                   |                       |
| 98.  | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan  | DPR/DPD                   |                       |
| 99.  | RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  | DPR/DPD                   |                       |
| 100. | RUU tentang Sumber Daya Genetik   | DPR/DPD                   |                       |
| 101. | RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan  | DPR/DPD                   |                       |
| 102. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan   | DPR/DPD                   |                       |

|  |  |
|--|--|
| Paraf 1<br> | Paraf 2<br> |
|--|--|

| NO   | JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG  | NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH | KETERANGAN/USULAN RUU      |
|------|--|---------------------------|----------------------------|
|      | Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam  |                           |                            |
| 103. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan                                       | DPR/DPD                   |                            |
| 104. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                 | DPR/DPD                   |                            |
| 105. | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen   | DPR/DPD                   |                            |
| 106. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | DPR/DPD                   |                            |
| 107. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara                       | DPR/DPD                   |                            |
| 108. | RUU tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa                                  | DPR/DPD                   | <i>Operan (Carry Over)</i> |
| 109. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh           | DPR/DPD                   |                            |
| 110. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji                             | DPR/DPD                   |                            |
| 111. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana                                | DPR/DPD                   |                            |
| 112. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia                             | DPR/DPD                   |                            |

|  |  |
|--|--|
| Paraf 1<br> | Paraf 2<br> |
|--|--|

| NO   | JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG   | NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH | KETERANGAN/USULAN RUU      |
|------|---|---------------------------|----------------------------|
| 113. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan/RUU tentang Sistem Pengupahan | DPR/DPD                   |                            |
| 114. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional                | DPR/DPD                   |                            |
| 115. | RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga  | DPR/DPD                   |                            |
| 116. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia          | DPR/DPD                   |                            |
| 117. | RUU tentang Kesehatan Masyarakat  | DPR/DPD                   |                            |
| 118. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional                           | DPR/DPD                   |                            |
| 119. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen                                       | DPR/DPD                   |                            |
| 120. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi                                    | DPR/DPD                   |                            |
| 121. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan   | DPR/DPD                   |                            |
| 122. | RUU tentang Ekonomi Syariah   | DPR/DPD                   |                            |
| 123. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional              | DPR/DPD                   |                            |
| 124. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara                                | DPR/DPD                   |                            |
| 125. | RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan   | DPR/DPD                   | <i>Operan (Carry Over)</i> |

|  |  |
|--|--|
| Paraf 1<br> | Paraf 2<br> |
|--|--|

| NO   | JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG   | NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH | KETERANGAN/USULAN RUU |
|------|---|---------------------------|-----------------------|
| 126. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi   | DPR/DPD                   |                       |
| 127. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan   | DPR/DPD                   |                       |
| 128. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi   | DPR/DPD                   |                       |
| 129. | RUU tentang Geologi   | DPR/DPD                   |                       |
| 130. | RUU tentang Keanekaragaman Hayati   | DPR/DPD                   |                       |
| 131. | RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim/RUU tentang Perubahan Iklim/RUU tentang Keadilan Iklim/ RUU tentang Perubahan Iklim                               | DPR/DPD                   |                       |
| 132. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah   | DPR/DPD                   |                       |
| 133. | RUU tentang Kewirausahaan/ RUU tentang Kewirausahaan Nasional   | DPR/DPD                   |                       |
| 134. | RUU tentang Masyarakat Hukum Adat   | DPR/DPD                   |                       |
| 135. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh  | DPR/DPD                   |                       |
| 136. | RUU tentang Daerah Kepulauan  | DPR/DPD                   |                       |
| 137. | RUU tentang Pembangunan Keluarga Berkualitas/RUU tentang Ketahanan Keluarga   | DPR/DPD                   |                       |
| 138. | RUU tentang Sistem Transportasi dan Logistik Nasional/RUU tentang Sistem Jaringan Transportasi Nasional/RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional | DPR/DPD                   |                       |
| 139. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara   | DPR/DPD                   |                       |

|  |  |
|--|--|
| Paraf 1<br> | Paraf 2<br> |
|--|--|

| NO   | JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG  | NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH | KETERANGAN/ USULAN RUU     |
|------|--|---------------------------|----------------------------|
|      | Jaminan Sosial/ RUU tentang Jaminan Sosial Pekerja Rentan  |                           |                            |
| 140. | RUU tentang Bahasa Daerah  | DPR/DPD                   |                            |
| 141. | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik   | DPR/DPD                   |                            |
| 142. | RUU tentang Kesetaraan Gender  | DPR/DPD                   |                            |
| 143. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup   | DPR/DPD                   |                            |
| 144. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara  | DPR/DPD                   |                            |
| 145. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara  | DPR/DPD                   |                            |
| 146. | RUU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian/RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan | PEMERINTAH/ DPD           |                            |
| 147. | RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara  | PEMERINTAH/ DPD           | <i>Operan (Carry Over)</i> |
| 148. | RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal   | PEMERINTAH                |                            |
| 149. | RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional   | PEMERINTAH                |                            |
| 150. | RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara  | PEMERINTAH                |                            |
| 151. | RUU tentang Badan Usaha  | PEMERINTAH                |                            |
| 152. | RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  | PEMERINTAH                |                            |

|  |  |
|--|--|
| Paraf 1<br> | Paraf 2<br> |
|--|--|

| NO   | JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG   | NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH | KETERANGAN/USULAN RUU |
|------|---|---------------------------|-----------------------|
| 153. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum                                  | PEMERINTAH                |                       |
| 154. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi      | PEMERINTAH                |                       |
| 155. | RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi   | PEMERINTAH                |                       |
| 156. | RUU tentang Perlelangan   | PEMERINTAH                |                       |
| 157. | RUU tentang Penilai   | PEMERINTAH                |                       |
| 158. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional                       | PEMERINTAH                |                       |
| 159. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal                           | PEMERINTAH                |                       |
| 160. | RUU tentang Rahasia Negara  | PEMERINTAH                |                       |
| 161. | RUU tentang Persandian  | PEMERINTAH                |                       |
| 162. | RUU tentang Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana   | PEMERINTAH                |                       |
| 163. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa | PEMERINTAH                |                       |
| 164. | RUU tentang Jaminan Benda Bergerak  | PEMERINTAH                |                       |
| 165. | RUU tentang Perubahan Harga Rupiah  | PEMERINTAH                |                       |
| 166. | RUU tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia  | DPD                       |                       |
| 167. | RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah  | DPD                       |                       |
| 168. | RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah  | DPD                       |                       |

|  |  |
|--|--|
| Paraf 1<br> | Paraf 2<br> |
|--|--|

| NO   | JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG  | NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH | KETERANGAN/USULAN RUU |
|------|--|---------------------------|-----------------------|
| 169. | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Daerah                           | DPD                       |                       |
| 170. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh         | DPD                       |                       |
| 171. | RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan                  | DPD                       |                       |
| 172. | RUU tentang Ketransmigrasian   | DPD                       |                       |
| 173. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial                  | DPD                       |                       |
| 174. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan                             | DPD                       |                       |
| 175. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian | DPD                       |                       |
| 176. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro                 | DPD                       |                       |

|  |  |
|--|--|
| Paraf 1<br> | Paraf 2<br> |
|--|--|

| NO | DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA  |
|----|---|
| 1. | Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional  |
| 2. | Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi   |
| 3. | Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara   |
| 4. | Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota                               |
| 5. | Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang |

KETUA,



Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

|  |  |
|--|--|
| Paraf 1<br> | Paraf 2<br> |
|--|--|